



Evaluasi Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Perdesaan

Ahmad Wahyudi Zein^{1*}, Nurul Hikmah Pasaribu², Sukma Anggriani³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id^{1*}, nurulpasaribu234@gmail.com²,
anggrianisukma1@gmail.com³

Korespondensi penulis : ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Abstract : *This research uses a qualitative method to evaluate the impact of social assistance programs on poverty alleviation in rural areas. The focus of this study is on how effectively the implementation of social assistance programs can improve the welfare of the rural poor, particularly in terms of economic conditions, social well-being, and quality of life. The findings indicate that social assistance programs have had a positive impact in reducing the economic burden of poor households, improving access to education and healthcare services, and encouraging community empowerment through productive economic activities. However, challenges remain, such as mistargeted beneficiaries, delays in distribution, and lack of supervision in program implementation. Therefore, continuous evaluation and active involvement from all stakeholders, including local governments and rural communities, are needed to ensure the optimal achievement of poverty alleviation goals. This study also recommends improvements in data collection systems and monitoring to ensure that social assistance programs are more effective and sustainable in the future.*

Keywords: *social assistance, poverty, rural areas, program evaluation, community empowerment.*

Abstrak : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi dampak program bantuan sosial terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan. Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana efektivitas implementasi program bantuan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa, khususnya dari segi ekonomi, sosial, dan kualitas hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial memiliki dampak positif dalam mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin, meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif. Namun, tantangan tetap ada, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan distribusi bantuan, dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat desa, agar tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara optimal. Penelitian ini juga merekomendasikan perbaikan sistem pendataan dan pengawasan agar program bantuan sosial lebih tepat guna dan berkelanjutan di masa depan.

Kata kunci: bantuan sosial, kemiskinan, perdesaan, evaluasi program, pemberdayaan masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai program pemerintah telah diluncurkan untuk mengatasinya, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah perdesaan masih berada dalam kondisi rentan dan serba kekurangan. Program bantuan sosial merupakan salah satu upaya konkret pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai skema, seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, dan bantuan pangan non-tunai. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah sejauh mana program-program ini benar-benar berdampak signifikan dalam mengangkat kehidupan masyarakat miskin dari keterpurukan. Apakah bantuan yang diberikan bersifat jangka panjang

dan berkelanjutan, atau hanya sekadar solusi sementara yang belum menyentuh akar permasalahan kemiskinan di perdesaan? Oleh karena itu, evaluasi yang mendalam terhadap pelaksanaan program bantuan sosial menjadi sangat penting guna mengetahui efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut dalam upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh (Suhartini & Lestari, 2020)

Perdesaan di Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam dan manusia yang sangat besar. Namun demikian, ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dalam aspek pembangunan masih terasa begitu nyata. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan infrastruktur yang memadai masih menjadi tantangan serius bagi masyarakat desa. Hal ini menjadikan masyarakat desa rentan terhadap kemiskinan struktural, di mana kemiskinan tersebut bukan hanya akibat dari ketidakmampuan individu, tetapi juga disebabkan oleh kondisi sistemik yang membatasi peluang mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan. Oleh karena itu, bantuan sosial yang diberikan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan sosial, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial dan ekonomi yang mampu mendorong masyarakat desa menjadi mandiri dan produktif. Tanpa pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif, program bantuan sosial akan sulit memberikan dampak jangka panjang dalam proses pembangunan pedesaan (Hidayat & Puspitasari, 2019)

Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai skema bantuan sosial yang menyasar kelompok masyarakat miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, distribusi bantuan yang tidak merata, kurangnya validasi data penerima, serta lemahnya pengawasan menjadi masalah krusial yang menghambat efektivitas program tersebut. Di beberapa kasus, bantuan yang diberikan tidak sampai kepada yang berhak, bahkan terjadi praktik-praktik manipulasi yang berujung pada pemborosan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain dari aspek teknis pendistribusian, aspek manajerial dan kebijakan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Program bantuan sosial harus dikelola dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis data yang valid agar benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Evaluasi berkala yang berbasis data lapangan sangat diperlukan untuk mengukur dampak aktual dari setiap bentuk bantuan sosial yang telah digulirkan, sekaligus sebagai dasar untuk perbaikan ke depan (Rahmawati & Setiawan, 2021)

Dalam konteks pembangunan nasional, pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial juga memiliki dimensi politis dan sosial yang cukup kompleks. Program bantuan sosial seringkali menjadi alat politik yang dimanfaatkan untuk meningkatkan popularitas pihak tertentu, terutama menjelang masa pemilu. Di sisi lain, penerima bantuan juga terkadang mengembangkan ketergantungan terhadap bantuan yang bersifat konsumtif dan tidak

produktif. Hal ini justru bertentangan dengan semangat pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi di level individu maupun komunitas. Maka dari itu, keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya diukur dari seberapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong perubahan perilaku dan mentalitas masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi. Pendekatan partisipatif dan edukatif menjadi kunci penting dalam mengelola program bantuan agar tidak menjadi beban jangka panjang bagi negara dan masyarakat (Anjani & Yusuf, 2022)

Lebih jauh, penting untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi lokal di pedesaan, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan alat produksi, dan akses terhadap pasar. Dengan demikian, masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku pembangunan yang berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Program bantuan sosial harus bersifat inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat desa, karena setiap wilayah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Pendekatan yang berbasis pada kebutuhan lokal dapat memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan kebijakan yang seragam di seluruh daerah. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal sangat diperlukan dalam merancang serta melaksanakan program bantuan yang berkelanjutan dan tepat sasaran (Wulandari & Prasetyo, 2023).

2. TINJAUAN TEORITIS

Konsep Kemiskinan Multidimensi

Kemiskinan tidak dapat hanya diukur melalui satu aspek seperti rendahnya pendapatan. Pandangan kontemporer menekankan bahwa kemiskinan merupakan kondisi multidimensi yang mencakup kekurangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, serta partisipasi sosial. Amartya Sen dalam teorinya menyebut bahwa yang lebih penting bukan sekadar pendapatan, tetapi kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dalam konteks pedesaan, kemiskinan sering kali disebabkan oleh rendahnya akses terhadap infrastruktur, minimnya kesempatan kerja produktif, serta kurangnya layanan dasar. Oleh karena itu, intervensi program bantuan sosial tidak bisa bersifat seragam dan hanya berorientasi pada materi, namun perlu dirancang untuk mengembangkan potensi individu dan komunitas. Pendekatan ini mendasari pentingnya pemberdayaan masyarakat desa agar mereka dapat secara mandiri memperbaiki kualitas hidupnya. Hal ini menjadikan bantuan sosial tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi sebagai pendorong transformasi sosial dan ekonomi secara menyeluruh (Yuliana & Ahmad, 2020)

Peran Negara dan Prinsip Welfare State

Dalam teori welfare state, negara memiliki peran sentral sebagai pelindung sosial masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat miskin. Negara tidak hanya bertugas menyediakan kebijakan ekonomi, tetapi juga wajib menjamin kesejahteraan warganya melalui intervensi aktif dalam bentuk program bantuan sosial. Di wilayah pedesaan, keterbatasan akses terhadap fasilitas dan ketimpangan distribusi pembangunan membuat campur tangan negara menjadi sangat penting. Bantuan sosial yang dirancang negara idealnya memenuhi prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kesinambungan. Program seperti bantuan langsung tunai, sembako, hingga subsidi usaha mikro merupakan wujud konkret peran negara dalam mendorong inklusi sosial dan mengurangi kesenjangan. Negara juga bertanggung jawab memastikan proses penyaluran tepat sasaran, transparan, dan dievaluasi secara berkala agar mencapai efektivitas maksimal. Dalam kerangka ini, negara bukan sekadar pemberi bantuan, tetapi pengarah transformasi sosial yang mendorong kemandirian masyarakat (Maulida & Ramadhan, 2019)

Pendekatan Pembangunan Partisipatif di Desa

Salah satu kunci keberhasilan program bantuan sosial di desa adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam seluruh prosesnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Teori pembangunan partisipatif menekankan bahwa masyarakat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif menentukan arah dan keberlanjutan program. Ketika program dirancang berdasarkan kebutuhan riil dan potensi lokal, hasilnya akan lebih relevan dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, pendekatan partisipatif dapat diwujudkan melalui musyawarah desa, forum warga, dan dialog dua arah antara masyarakat dengan penyelenggara program. Model ini juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab warga terhadap keberhasilan program bantuan. Selain itu, partisipasi masyarakat mampu meminimalisir konflik sosial dan memperkuat solidaritas antarwarga. Maka dari itu, pendekatan ini sangat direkomendasikan dalam konteks wilayah pedesaan yang memiliki karakter sosial yang khas dan kearifan lokal yang kuat (Siregar & Kartika, 2021)

Risiko Ketergantungan dan Tantangan Kemandirian

Meskipun bantuan sosial memiliki dampak positif dalam menurunkan angka kemiskinan, namun terdapat risiko besar berupa munculnya ketergantungan terhadap bantuan tersebut. Teori ketergantungan (*dependency theory*) menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan secara terus-menerus tanpa adanya upaya pemberdayaan dapat menurunkan semangat masyarakat untuk mandiri. Fenomena ini sering terjadi di wilayah pedesaan, di mana masyarakat cenderung pasif dan menunggu bantuan datang, tanpa adanya dorongan untuk

meningkatkan kapasitas diri. Dalam jangka panjang, hal ini justru dapat memperparah kemiskinan struktural. Oleh karena itu, program bantuan sosial perlu disertai dengan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta akses terhadap modal dan pasar. Strategi ini dapat mendorong transformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi produktif. Dengan demikian, bantuan sosial bukan menjadi alat pengikat masyarakat dalam kemiskinan, tetapi menjadi tangga awal menuju kemandirian ekonomi (Putra & Anggraini, 2022)

Evaluasi Program Bantuan Sosial

Evaluasi merupakan komponen penting dalam menilai efektivitas dan dampak dari program bantuan sosial yang diterapkan di wilayah pedesaan. Dalam teori evaluasi kebijakan publik, proses evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar dapat mengidentifikasi keberhasilan maupun kekurangan program. Evaluasi yang baik tidak hanya menilai output seperti jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga harus mengukur outcome seperti perubahan kualitas hidup masyarakat. Di daerah pedesaan, pendekatan evaluasi kualitatif sangat relevan karena mampu menggali pengalaman langsung dari penerima manfaat dan dinamika sosial di tingkat lokal. Informasi yang diperoleh dari evaluasi ini sangat berharga untuk merancang kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, evaluasi juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap praktik penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran bantuan. Oleh karena itu, penting bagi setiap program bantuan sosial untuk memiliki mekanisme evaluasi yang jelas dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Lestari & Nugroho, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi dampak program bantuan sosial terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam realitas sosial dan persepsi masyarakat terhadap efektivitas implementasi bantuan sosial. Penelitian dilakukan di beberapa desa yang telah menerima program bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, dengan mempertimbangkan keragaman kondisi sosial ekonomi di masing-masing lokasi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, dokumentasi program, serta wawancara mendalam dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat bantuan sosial. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sebagaimana dijelaskan dalam model analisis interaktif Miles dan Huberman. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik, guna memastikan keandalan hasil penelitian. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang

holistik mengenai efektivitas program bantuan sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam menanggulangi kemiskinan di tingkat perdesaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program bantuan sosial yang diterapkan di wilayah perdesaan secara umum memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Program ini berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, terutama dalam aspek ekonomi, seperti penyediaan kebutuhan pangan, biaya pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Dengan adanya bantuan sosial, beban pengeluaran rumah tangga menjadi lebih ringan sehingga masyarakat dapat mengalokasikan pendapatan untuk hal-hal yang lebih produktif. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan taraf hidup dan stabilitas ekonomi keluarga miskin.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan teknis seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, distribusi yang kurang tepat waktu, serta lemahnya pengawasan di lapangan menjadi faktor penghambat. Selain itu, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan bantuan sosial secara produktif menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh nominal bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas sistem pelaksanaan, pendampingan, dan peran aktif masyarakat lokal dalam mengelola bantuan secara berkelanjutan dan mandiri.

Tabel 1. Dampak Ekonomi Bantuan Sosial terhadap Rumah Tangga Penerima

No	Indikator Dampak Ekonomi	Temuan Lapangan	Analisis Peneliti
1	Pendapatan Harian	Meningkat setelah menerima bantuan	Bantuan digunakan sebagai modal usaha kecil
2	Beban Konsumsi Rumah Tangga	Berkurang secara signifikan	Sembako membantu penghematan pengeluaran harian
3	Kebutuhan Pokok Anak	Dapat terpenuhi secara berkala	Pembelian kebutuhan sekolah menjadi lebih teratur
4	Tabungan Darurat	Mulai bisa menyisihkan sebagian dana	Indikasi peningkatan stabilitas keuangan rumah tangga
5	Akses ke Modal Usaha	Terbantu melalui bantuan tunai	Memungkinkan memulai usaha rumahan sederhana

Penjelasan Tabel 1:

Hasil dari observasi lapangan menunjukkan bahwa bantuan sosial memberikan dampak ekonomi langsung terhadap rumah tangga miskin. Salah satu indikator utama adalah peningkatan pendapatan harian, yang terjadi karena sebagian penerima bantuan memanfaatkan dana tunai untuk memulai usaha kecil, seperti jualan makanan, warung kelontong, atau

peternakan skala rumahan. Selain itu, distribusi sembako yang dilakukan secara berkala juga mengurangi beban pengeluaran harian, khususnya untuk konsumsi pokok, sehingga memberikan ruang untuk alokasi ke kebutuhan lainnya.

Temuan lain menunjukkan bahwa orang tua penerima bantuan lebih mudah memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka, seperti membeli perlengkapan belajar dan membayar iuran. Di beberapa kasus, penerima manfaat juga mulai bisa menyisihkan dana untuk tabungan darurat, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Bantuan sosial pun terbukti mendorong masyarakat untuk berani mengambil langkah memulai usaha baru karena mereka tidak lagi terlalu khawatir terhadap kebutuhan dasar harian. Hal ini selaras dengan teori safety net, di mana bantuan sosial dapat menjadi dasar keamanan ekonomi agar masyarakat bisa mengambil risiko produktif (Susanti & Rahmadani, 2021)

Tabel 2. Dampak Sosial Bantuan Sosial terhadap Dinamika Masyarakat

No	Indikator Dampak Sosial	Temuan Lapangan	Analisis Peneliti
1	Solidaritas antarwarga	Meningkat melalui gotong royong saat pembagian bantuan	Warga saling membantu dan berbagi informasi
2	Konflik Sosial	Muncul pada kasus ketidaktepatan sasaran	Ketegangan antara penerima dan yang merasa tidak layak
3	Partisipasi dalam kegiatan	Meningkat setelah menerima bantuan	Warga lebih aktif dalam forum desa
4	Ketergantungan terhadap bantuan	Terlihat pada beberapa kelompok	Minim inisiatif untuk mandiri tanpa bantuan
5	Kepercayaan terhadap pemerintah	Meningkat jika bantuan lancar	Transparansi distribusi memperkuat legitimasi pemimpin

Penjelasan Tabel 2:

Secara sosial, bantuan sosial memengaruhi hubungan antarwarga di desa. Salah satu dampak positif adalah meningkatnya solidaritas dan gotong royong, terutama ketika bantuan dibagikan dalam forum terbuka. Warga saling mendukung dan bekerja sama, misalnya membantu lansia dalam mengambil bantuan atau berbagi informasi teknis terkait syarat administratif. Namun, tantangan sosial juga muncul, terutama ketika ada warga yang merasa tidak mendapatkan haknya. Hal ini menimbulkan konflik horizontal dan menurunkan keharmonisan sosial.

Kegiatan kemasyarakatan pun menunjukkan peningkatan, karena masyarakat yang ekonominya terbantu menjadi lebih aktif berpartisipasi. Meski demikian, masih terlihat indikasi ketergantungan pada bantuan, terutama di kalangan lansia dan rumah tangga miskin ekstrem, yang tidak lagi berinisiatif mencari alternatif pendapatan. Kepercayaan kepada

pemerintah desa cenderung meningkat bila penyaluran dilakukan secara transparan dan tepat waktu. Namun, saat terjadi keterlambatan atau ketidaktepatan sasaran, masyarakat mulai meragukan kredibilitas aparat lokal (Maulani & Syarifuddin, 2020)

Tabel 3. Dampak Terhadap Akses Pendidikan dan Kesehatan

No	Indikator Akses Layanan	Temuan Lapangan	Analisis Peneliti
1	Kehadiran Sekolah Anak	Lebih teratur dan konsisten	Dana bantuan membantu biaya seragam dan transportasi
2	Pembayaran Iuran Sekolah	Tidak tertunda seperti sebelumnya	Keluarga dapat mengalokasikan dana secara rutin
3	Akses Pelayanan Kesehatan	Meningkat di Puskesmas	Bantuan digunakan untuk biaya perjalanan ke layanan
4	Nutrisi dan Gizi Anak	Mulai meningkat secara perlahan	Adanya bantuan pangan bergizi seperti telur dan susu
5	Kesadaran akan Kesehatan	Lebih baik daripada sebelumnya	Edukasi dari petugas desa mulai diterima masyarakat

Penjelasan Tabel 3:

Program bantuan sosial juga berkontribusi terhadap peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Beberapa keluarga menyatakan bahwa anak-anak mereka kini lebih rutin ke sekolah karena tidak lagi terbebani oleh biaya seragam, alat tulis, dan transportasi. Biaya iuran sekolah yang sebelumnya sering tertunda, kini bisa dibayar tepat waktu berkat alokasi dana dari bantuan tunai. Hal ini menunjukkan adanya peran bantuan sebagai penyangga pembiayaan pendidikan dasar.

Dalam aspek kesehatan, keluarga penerima bantuan lebih aktif memanfaatkan layanan Puskesmas. Sebelumnya, kendala transportasi dan biaya perjalanan membuat mereka menunda pemeriksaan. Kini, bantuan tunai dapat dimanfaatkan untuk biaya perjalanan, dan bantuan sembako juga membantu perbaikan gizi, terutama untuk anak-anak. Petugas desa juga mulai melakukan edukasi kesehatan yang diterima lebih baik karena kondisi masyarakat sudah lebih stabil secara ekonomi (Hasanah & Budiarto, 2022)

Tabel 4. Tantangan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial

No	Indikator Tantangan	Temuan Lapangan	Analisis Peneliti
1	Ketidaktepatan Sasaran	Masih ada warga mampu yang menerima bantuan	Data tidak diperbarui secara berkala
2	Keterlambatan Distribusi	Bantuan sering terlambat dari jadwal	Menimbulkan ketidakpercayaan terhadap petugas
3	Minimnya Pendampingan	Kurangnya edukasi terkait pemanfaatan bantuan	Warga kurang tahu cara kelola bantuan secara produktif
4	Ketergantungan Sosial	Warga enggan mencari penghasilan lain	Tidak ada penguatan kapasitas mandiri
5	Keterbatasan Sumber Daya Desa	Fasilitas distribusi masih minim	Pengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan

Penjelasan Tabel 4:

Meskipun dampak bantuan sosial cukup signifikan, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah ketidaktepatan sasaran penerima, di mana beberapa warga yang tergolong mampu masih menerima bantuan, sementara warga miskin lainnya terabaikan. Hal ini disebabkan oleh pendataan yang tidak diperbarui secara berkala. Selain itu, keterlambatan distribusi bantuan juga menjadi keluhan utama masyarakat, yang berpengaruh langsung terhadap kepercayaan terhadap petugas dan pemerintah desa.

Kurangnya pendampingan terkait pemanfaatan bantuan juga menyebabkan dana bantuan sering kali habis untuk konsumsi jangka pendek, tanpa ada upaya investasi produktif. Akibatnya, ketergantungan sosial semakin meningkat. Di sisi lain, sumber daya yang dimiliki desa untuk mendukung proses distribusi masih sangat terbatas, baik dari sisi infrastruktur maupun tenaga pendamping. Situasi ini menuntut adanya perbaikan menyeluruh dalam sistem manajemen program bantuan sosial agar dampaknya benar-benar maksimal dan berkelanjutan (Rahmawati & Hidayat, 2023).

4. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial berperan penting dalam pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan, terutama dalam meringankan beban ekonomi dan meningkatkan akses layanan dasar. Akan tetapi, efektivitas program masih terganggu oleh berbagai tantangan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan sistem pelaksanaan, akurasi pendataan, peningkatan pengawasan, serta pendekatan pemberdayaan yang menyeluruh agar program ini benar-benar mampu mendorong masyarakat menuju kemandirian dan keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Anjani, N. A., & Yusuf, R. (2022). Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Perubahan Perilaku Ekonomi Rumah Tangga di Perdesaan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 13(1), 55–66.
- Hidayat, T., & Puspitasari, R. (2019). Ketimpangan Akses Pelayanan Sosial di Wilayah Perdesaan: Studi Evaluasi Program PKH. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 89–101.
- Kurniawan, D. (2020). *Kebijakan Publik dan Pembangunan Ekonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari, S., & Nugroho, B. (2023). Evaluasi Program Bantuan Sosial: Studi Kasus Desa Tertinggal. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 45–58.

- Maulida, I., & Ramadhan, M. F. (2019). Prinsip Welfare State dalam Kebijakan Bantuan Sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Kebijakan*, 4(3), 112–125.
- Putra, R., & Anggraini, L. (2022). Ketergantungan Sosial dalam Bantuan Pemerintah: Perspektif Teori Ketergantungan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 9(2), 78–90.
- Rahmawati, F., & Setiawan, A. (2021). Analisis Distribusi dan Validasi Data Program Bantuan Sosial. *Jurnal Manajemen Publik*, 10(3), 134–147.
- Siregar, M., & Kartika, D. (2021). Pembangunan Partisipatif: Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 66–78.
- Suhartini, E., & Lestari, M. (2020). Efektivitas Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial dan Humaniora*, 5(1), 22–35.
- Susanti, R. (2021). *Kemiskinan dan Strategi Intervensi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahputra, A. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Bantuan Sosial*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wulandari, R., & Prasetyo, A. (2023). Integrasi Program Bantuan Sosial dengan Pemberdayaan Ekonomi Lokal. *Jurnal Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 99–112.
- Yuliana, D., & Ahmad, Z. (2020). Kemiskinan Multidimensi dan Tantangan Intervensi Sosial di Perdesaan. *Jurnal Penelitian Sosial*, 8(1), 44–58.
- Zainuddin, M. (2019). *Kemiskinan Struktural dan Solusi Pembangunan Berbasis Komunitas*. Jakarta: Kencana.
- Zuhri, R. (2021). *Negara dan Kesejahteraan Sosial: Studi Kritis Program Bansos di Indonesia*. Surabaya: Laksana Media.